



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA BPK RI  
PADA  
UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-65  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
17 JANUARI 2012**

Yth. Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK;  
Yth. Para sesepuh: mantan Ketua BPK, mantan Wakil Ketua BPK,  
dan mantan Anggota BPK;  
Yth. Para Undangan dan Hadirin; serta  
Yth. Para Pejabat Struktural dan seluruh karyawan/karyawati BPK;

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,  
*Om swastyastu,*

Mengawali sambutan ini, marilah tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-65 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami secara pribadi dan atas nama Pimpinan BPK menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Ke-65 BPK kepada para sesepuh, senior, rekan-rekan sekerja, dan seluruh pegawai BPK di manapun berada. Mudah-mudahan, seiring dengan bertambahnya usia BPK, kita dapat membawa BPK melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peringatan ulang tahun selalu menjadi saat yang istimewa sekaligus penuh makna. Hari peringatan tersebut menjadi saat paling tepat untuk melakukan evaluasi mengenai perjalanan pelaksanaan tugas BPK, sekaligus mencanangkan tekad ke depan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada.

**Saudara-saudara yang berbahagia,**

Pada peringatan ulang tahun BPK hari ini, saya mengingatkan kembali tugas BPK sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan tugas tersebut dalam kerangka untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pendirian BPK bertujuan untuk mendorong pencapaian tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan mandat konstitusi tersebut, BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan keuangan, melainkan juga pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Seluruh pemeriksaan tersebut dilakukan BPK untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik, transparan, dan akuntabel (*good governance*). Selama tahun 2011, BPK telah banyak menorehkan tinta kinerja yang positif. Di bidang pemeriksaan, BPK telah meningkatkan kualitas proses pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya.

Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, rekomendasi BPK telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas laporan keuangannya. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010. Opini WDP tersebut mengalami peningkatan sejak TA 2009, setelah selama lima tahun berturut-turut, sejak TA 2004, memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*). Kenaikan opini juga terjadi pada laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL), serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

BPK sesuai dengan kewenangannya harus terus mendorong pemerintah untuk bekerja keras, tidak saja untuk mempertahankan opini yang dicapai pada saat ini, tetapi juga untuk mencapai opini yang lebih baik lagi. Khusus untuk pemerintah daerah, pekerjaan rumah masih banyak karena persentase LKPD yang memperoleh opini WTP, meskipun terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, namun jumlahnya relatif masih sedikit.

Untuk itu, saya minta kepada para Kepala Perwakilan BPK untuk lebih aktif mendorong pemerintah daerah memperbaiki kualitas laporan keuangan dan pengelolaan keuangannya. Tentu dengan tetap memperhatikan integritas, independensi, dan profesionalisme BPK.

**Saudara-saudara yang berbahagia,**

Dalam aspek pengelolaan keuangan negara, penyajian laporan keuangan secara wajar merupakan satu hal yang penting. Namun demikian, hal itu tidak cukup karena entitas juga harus bisa mencapai suatu kondisi dimana program yang direncanakan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu, program-program yang dilaksanakan juga harus tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di sinilah arti penting pemeriksaan kinerja oleh BPK.

Oleh karena itu, sesuai dengan Rencana Strategis BPK Tahun 2011-2015, secara bertahap BPK telah membuat kebijakan untuk meningkatkan fokus pemeriksaannya pada pemeriksaan kinerja. Pada tahun 2011, BPK antara lain melakukan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji; kinerja pelayanan kesehatan; kinerja pendidikan; kinerja rumah sakit; dan lain-lain. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada.

Pada tahun-tahun berikutnya BPK merencanakan memperbanyak jumlah pemeriksaan kinerja, terus menyempurnakan metodologi pemeriksaan kinerja, dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. BPK mengharapkan, melalui pemeriksaan kinerja tersebut BPK dapat menilai suatu program apakah telah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, pemeriksaan tersebut juga untuk menilai apakah program tersebut membawa dampak perubahan positif dalam jangka panjang yang berkelanjutan.

**Saudara-saudara yang berbahagia,**

Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK antara lain memeriksa pengelolaan pendapatan negara dan pendapatan daerah; pelaksanaan belanja baik di pusat maupun daerah; manajemen aset pemerintah daerah; pemeriksaan dana otsus Provinsi Papua dan Papua Barat; pemeriksaan operasional BUMN dan BUMD, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Dalam pemeriksaan ini, BPK mengungkapkan, antara lain, berbagai kelemahan sistem pengendalian intern, adanya kekurangan penetapan dan pemungutan pajak, pengadaan barang/jasa fiktif, pemahalan harga (*mark up*), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya. Dalam pemeriksaan atas pengelolaan dana otsus Provinsi Papua dan Papua Barat, BPK menemukan adanya penggunaan dana otsus yang tidak sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan harkat hidup rakyat Papua dan Papua Barat. Hasil pemeriksaan BPK mengenai dana otsus tersebut mendapat perhatian yang besar dari Pemerintah yang akan menindaklanjutinya.

Dalam tahun 2011, BPK juga melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas permintaan DPR RI. Di antaranya adalah pemeriksaan atas proses pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) oleh pemerintah. Selain itu, BPK juga melakukan Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas Kasus PT Bank Century untuk memenuhi permintaan DPR RI. Hasil pemeriksaan atas divestasi saham PT NNT dan kasus PT Bank Century tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra di beberapa kalangan.

Perlu dipahami oleh segenap jajaran BPK, dua contoh pemeriksaan tersebut menjadi bukti independensi BPK. Sesuai dengan konstitusi, BPK adalah lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri. BPK tidak berdiri berpihak di sisi pemerintah dan juga tidak berpihak di sisi DPR RI. BPK melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya sesuai dengan fakta yang ditemukan dan sesuai dengan apa kata undang-undang. Untuk dapat melakukan hal itu, BPK selalu berpedoman pada nilai dasar BPK, yaitu independen, integritas, dan profesionalisme.

Pada kesempatan ini, saya minta kepada seluruh jajaran BPK agar benar-benar memegang nilai dasar ini. BPK harus tetap teguh berkarya berdasarkan fakta dan apa kata undang-undang. Bagi BPK, kalimat tersebut sudah menjadi dalil (*postulate*) yang harus dilaksanakan.

### **Saudara-saudara yang berbahagia,**

Terkait dengan upaya pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi, BPK juga sudah menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. Selama dua tahun kepemimpinan BPK periode 2009-2014, BPK telah menyerahkan laporan yang berindikasi korupsi kepada aparat penegak hukum.

BPK juga telah menyampaikan Hasil Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas Kasus PT Bank Century kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. BPK senantiasa berkomitmen untuk bekerja sama dengan para aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

BPK menyadari upaya penanggulangan korupsi di Indonesia tidak cukup dengan upaya penindakan (*repressif*) melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK kepada penegak hukum, namun tidak kalah penting adalah upaya pencegahan (*preventif*). Terkait dengan hal tersebut, BPK merencanakan mengambil langkah-langkah yang lebih strategis dan sistematis melalui penerapan Fraud Control System (FCS) untuk mencegah terjadinya korupsi.

Sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2011-2015, BPK merencanakan melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai apakah pemerintah sudah membuat kebijakan dan sistem untuk mencegah terjadinya korupsi di pemerintahan atau *fraud control system (FCS)*, serta bagaimana implementasinya. BPK mengharapkan melalui pemeriksaan kinerja tersebut dapat memberikan masukan secara komprehensif dan sistematis kepada pemerintah dalam merancang kebijakan penanggulangan korupsi secara nasional.

Kepada seluruh jajaran BPK, saya minta terus menyempurnakan rencana dan program pemeriksaan kinerja atas FCS tersebut agar dapat kita laksanakan dengan baik. Pada *piloting* pemeriksaan kinerja atas FCS yang akan kita laksanakan pada tahun 2012, saya minta kepada seluruh jajaran pemeriksaan, termasuk Perwakilan BPK, agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **Saudara-saudara yang berbahagia,**

Sejak BPK menyampaikan gagasan tentang pembentukan pusat data BPK kepada para pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, 21 Januari 2010, gagasan tersebut mendapatkan dukungan yang positif dari berbagai pihak. Dukungan tersebut terwujud dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga negara, kementerian, lembaga nonkementerian, pemerintah daerah, dan BUMN, sebanyak 1.061 MoU. Semua pihak sudah menyadari, pembentukan pusat data BPK tersebut akan memberikan manfaat tidak saja bagi BPK, tetapi juga bagi entitas yang bersangkutan.

Pada tahun 2011, selain melakukan serangkaian proses penandatanganan MoU dengan entitas, secara internal BPK juga terus menyiapkan infrastruktur dan penyempurnaan konsep pusat data BPK, yang selanjutnya disebut dengan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI). Penyiapan infrastruktur tersebut berupa penyusunan aturan tindak lanjut kesepakatan antara BPK dengan entitas, penyediaan *hardware* dan *software* di bidang teknologi, dan pelatihan kepada pemeriksa.

Untuk suksesnya kegiatan *piloting* tersebut, saya minta kepada seluruh jajaran BPK untuk memberikan dukungan dan melaksanakan secara penuh. Kita mengharapkan, dengan suksesnya kegiatan *piloting*, pada pelaksanaan pemeriksaan berikutnya, *e-audit* dengan memanfaatkan SNSI sudah menjadi bagian dari aktivitas pemeriksaan BPK sehari-hari. Dengan demikian, pemeriksaan BPK dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif serta dengan cakupan pemeriksaan yang lebih luas. Selain itu, apabila *e-audit* sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, BPK akan terbiasa bekerja secara *paperless* yang dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberlangsungan lingkungan hidup (*go eco-friendly*). Ini jauh lebih berarti daripada kita menanam pohon karena kecepatan pertumbuhan pohon jauh lebih lambat daripada kecepatan kita menghabiskan kertas.

#### **Saudara-saudara yang berbahagia,**

Selain di bidang pemeriksaan, BPK juga memperoleh banyak kemajuan di bidang non pemeriksaan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPK Tahun 2010 memperoleh penghargaan dengan predikat B atau "Baik" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Predikat tersebut diterima BPK bersama dengan 10 kementerian dan lembaga yang lain. Ke depan, semoga kita bisa memperoleh predikat A atau "Sangat Baik", bahkan AA atau "Memuaskan".

Selain itu, Laporan Keuangan BPK TA 2009 dan 2010 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini tersebut harus terus dipertahankan melalui praktik pengelolaan keuangan yang baik dan benar, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Terkait dengan pengelolaan keuangan, sejak tiga tahun terakhir jumlah anggaran BPK mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dukungan dan kepercayaan dari DPR dan Pemerintah kepada BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dukungan yang diwujudkan dalam kenaikan anggaran BPK yang cukup besar tersebut, harus dimanfaatkan oleh BPK untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Saya minta kepada seluruh jajaran BPK, untuk menggunakan anggaran tersebut dengan benar dan sesuai dengan aturan guna meningkatkan kinerja BPK. Kepada Inspektorat Utama saya minta meningkatkan *quality assurance* untuk menjamin kualitas pengelolaan anggaran dan hasil pemeriksaan BPK.

**Saudara-saudara yang berbahagia,**

Di bidang pembinaan SDM, BPK telah mendidik personil yang memiliki berbagai keahlian di bidang pemeriksaan. Termasuk di antaranya ahli di bidang teknologi informasi yang bersertifikat CISA, dan ahli dalam pemeriksaan investigasi yang bersertifikat CFE. Personil tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan memenuhi standar profesionalisme. BPK juga melengkapi pemeriksaannya dengan berbagai *software* audit yang diperlukan, termasuk *software* terbaru yang dimanfaatkan oleh Tim Pemeriksa Investigasi Lanjutan Kasus PT Bank Century untuk menganalisa aliran dana Bank Century.

Hal penting lainnya terkait dengan pembinaan SDM adalah penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa BPK secara berkelanjutan. Dengan penerapan JFP tersebut, seluruh pemeriksa BPK yang ditempatkan di unit pemeriksa telah ditetapkan perannya. Selain itu, BPK telah mengalihkan jabatan struktural kepala seksi (eselon IV) sebanyak 218 orang di unit pemeriksa menjadi jabatan fungsional pemeriksa dengan peran Ketua Tim Senior.

Untuk menilai kinerja SDM, BPK telah menerapkan sistem Manajemen Kinerja Individu. Sedang untuk menjamin standar kompetensi SDM, BPK telah memiliki standar kompetensi jabatan, yaitu Standar Kompetensi Perilaku Pegawai BPK dan Standar Kompetensi Teknis Pemeriksa BPK.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut bertujuan untuk menjamin tugas BPK dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kemampuan profesional, bisa berlaku independen, dan memiliki integritas yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, seluruh pedoman dan standar untuk menjamin dan meningkatkan kinerja SDM BPK harus terus disempurnakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **Saudara-saudara yang berbahagia,**

Sejak dua tahun terakhir, BPK terus menyempurnakan berbagai perangkat yang diperlukan dalam Program Reformasi Birokrasi di BPK. Untuk mengetahui secara objektif sejauh mana kemajuan kita dalam melaksanakan program reformasi birokrasi, BPK telah dinilai oleh Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional. Hasil penilaian yang mencakup 8 area perubahan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa BPK memperoleh **nilai 85,67** dari skor maksimal 100. Dengan demikian, proses Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan BPK termasuk dalam kategori **baik**.

Pada kesempatan yang baik ini, saya minta kepada seluruh jajaran pelaksana BPK untuk memahami reformasi birokrasi secara utuh. Reformasi birokrasi hakikatnya merupakan perubahan pola pikir dan budaya kerja di BPK. Saya sangat sedih apabila reformasi birokrasi hanya dimaknai sebagai "tambahan remunerasi". Semoga kondisi tersebut tidak terjadi di BPK. Perlu Saudara-saudara pahami, meskipun berdasar hasil penilaian, BPK memperoleh predikat baik, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan untuk mencapai kondisi Reformasi Birokrasi yang ideal.

Atas pencapaian kinerja Reformasi Birokrasi BPK yang memperoleh predikat baik tersebut, Pimpinan dan para Anggota BPK mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai BPK. Selanjutnya, kami tetap mohon dukungan dan doa dari para pelaksana BPK agar dapat segera memperoleh kenaikan remunerasi mengingat sampai dengan saat ini masih terdapat sejumlah proses yang harus dilalui.

### **Saudara-saudara yang berbahagia,**

Pada tanggal 15 s.d. 17 November 2011 yang lalu, BPK mencetak sejarah menjadi inisiator dan tuan rumah pendirian organisasi BPK se-*ASEAN* (*ASEANSAI*) di Nusa Dua, Bali.

Pendirian *ASEANSAI* tersebut bertujuan antara lain untuk meningkatkan kapasitas dan kerja sama di bidang pemeriksaan keuangan negara di antara BPK negara-negara anggota *ASEAN*. Dalam sidang pertama *ASEANSAI*, Ketua BPK terpilih sebagai Ketua *ASEANSAI* pertama periode 2011-2013. Sedangkan Sekretaris Jenderal BPK ditetapkan sebagai Kepala Sekretariat *ASEANSAI* untuk periode yang sama.

Catatan sejarah yang lain, pada 11 November 2011 yang lalu, pada pertemuan kesebelas *Steering Committee of INTOSAI WGEA* di Buenos Aires, Argentina, BPK terpilih menjadi Ketua *International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI WGEA)* untuk periode 2013–2016. Hal ini merupakan salah satu capaian penting BPK di tingkat internasional, khususnya terkait dengan pemeriksaan lingkungan.

Dua catatan sejarah penting tersebut pada hakekatnya dimaksudkan untuk semakin meningkatkan kinerja BPK dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini merupakan wujud nyata dari program reformasi birokrasi di BPK.

#### **Saudara-saudara yang berbahagia,**

Hasil yang telah kita capai dalam dua tahun terakhir tidak terlepas dari keberhasilan dan peran pimpinan BPK periode sebelumnya dan merupakan pondasi untuk melanjutkan program di masa datang. Mau dibawa kemana BPK dan bagaimana cara mencapai tujuan BPK telah kita tuangkan dalam Rencana Strategis BPK tahun 2011-2015. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan Renstra dengan sebaik-baiknya agar Renstra tersebut dapat kita wujudkan menjadi karya nyata BPK.

Sejalan dengan peningkatan kinerja BPK, maka perhatian pemangku kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum, terhadap hasil pemeriksaan BPK juga semakin meningkat. Oleh karena itu, saya minta informasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dijaga akurasinya dan hindari adanya kesalahan (*zero defect*). Selain itu, untuk menjamin keaktualan informasi dalam LHP BPK, pada tahun 2012 ini, saya minta kepada seluruh satuan kerja pemeriksa tidak ada lagi yang terlambat menyelesaikan LHP.

**Saudara-saudara yang berbahagia,**

Mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada seluruh jajaran di BPK untuk selalu menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalisme. Perlu disadari bahwa reformasi birokrasi di BPK, termasuk pemberian remunerasi yang pantas kepada pegawai BPK, dimaksudkan untuk semakin meningkatkan kinerja BPK. Oleh karena itu, saya sebagai Pimpinan BPK tidak akan bosan untuk mengingatkan kepada seluruh jajaran pelaksana BPK, untuk selalu memegang integritas dalam setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan.

Meskipun dalam setiap kesempatan Pimpinan BPK selalu mengingatkan, di tahun 2011 lalu kita masih saja mengalami kejadian memalukan terkait penyimpangan perilaku pemeriksa yang melanggar peraturan dan kode etik BPK. Pimpinan BPK tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas pada setiap penyimpangan yang dilakukan para pelaksana BPK tersebut, termasuk pemberian sanksi pemecatan sebagai pegawai negeri. Sebaliknya, kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja, BPK akan memberikan penghargaan (*reward*), termasuk berupa kenaikan pangkat istimewa.

BPK dapat berdiri tegak karena lembaga ini sangat menjunjung tinggi kredibilitas organisasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, dalam menunaikan tugas konstitusionalnya, BPK selalu berkarya dengan berpegang teguh pada fakta dan apa kata undang-undang.

Demikian, sambutan kami, **Dirgahayu Ke-65 BPK**, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, serta memberkati upaya kita dalam membangun bangsa dan negara kita. Amin.

*Wabillahitaufik Walhidayah,*

*Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Oom Ćanti Ćanti Ćanti Oom*

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Ketua,**

**Drs Hadi Poernomo, Ak**